

Urgensi Penggunaan Terminologi Moderat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Indonesia

Kurniawan Netanyahu¹, Rizki Amalia Yanuartha², Putri Hergianasari^{3*}

¹IAKN Palangkaraya, Indonesia

^{2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*corresponding author: putri.hergianasari@uksw.edu

ABSTRACT:

This study is a comparative analysis of leadership between President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo that focuses on the importance of adopting moderate terminology in Indonesian foreign policy. This study used qualitative research methods. The data was collected from interviews with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, academics and peace practitioners in Indonesia. Researchers found differences in the urgency of the term "moderate" in Indonesian foreign policy in the era of President SBY and President Jokowi. President SBY uses moderate terminology to correct, persuade, prove, and emphasize that Islam in Indonesia does not legalize the use of violence in religious life. President SBY explained that Islam in Indonesia can synergize with democratic values and can live side-by-side with people of other religions. However, President SBY did not pay attention to domestic conditions and instead allowed an arrogant mass organization, namely the FPI, to commit acts of violence against religious minorities. The various images of Islam conveyed by President SBY are inversely proportional to the conditions of inter-religious relations within the country. Meanwhile, President Jokowi, although not prioritizing efforts to rebrand the image of Islam in Indonesia, the Indonesian President continues to use moderate terminology, namely Moderate Islam in various Indonesian foreign affairs. Due to Indonesia's international cooperation, President Jokowi uses the issue of moderate Islam to assist the country's national development program. To maintain religious harmony, President Jokowi issued a stern policy of prohibiting and revoking the legal permits of FPI and HTI. These organizations are mass organizations and Islamic groups that violate Pancasila values. However, there is a red note in Jokowi's current administration, namely that there has been no review of discriminatory laws.

ARTICLE HISTORY:

Received: Januari 2023

Accepted: Mei 2023

Published: Juni 2022

KEYWORDS:

Islam Moderation; Joko Widodo; Susilo Bambang Yudhoyono.

ABSTRAK:

Kajian ini merupakan analisis perbandingan kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pentingnya mengadopsi terminologi moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari wawancara dengan Kementerian Luar Negeri RI, akademisi dan praktisi perdamaian di Indonesia. Peneliti menemukan perbedaan urgensi istilah "moderat" dalam politik luar negeri Indonesia di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Presiden SBY menggunakan terminologi moderat untuk mengoreksi, membujuk, membuktikan, dan menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak melegalkan penggunaan kekerasan dalam kehidupan beragama. Presiden SBY menjelaskan bahwa Islam di Indonesia dapat bersinergi dengan nilai-nilai demokrasi dan dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Namun, Presiden SBY tidak memperhatikan kondisi dalam negeri dan malah membiarkan ormas arogan, yakni FPI, melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Berbagai citra Islam yang disampaikan Presiden SBY berbanding terbalik dengan kondisi hubungan antar umat beragama di dalam negeri. Sementara itu, Presiden Jokowi, meski tidak mengedepankan upaya rebranding citra Islam di Indonesia, Presiden RI tetap menggunakan terminologi moderat yakni Islam Moderat dalam berbagai urusan luar negeri Indonesia. Karena kerjasama internasional Indonesia, Presiden Jokowi menggunakan isu Islam moderat untuk membantu program pembangunan nasional negara. Untuk menjaga kerukunan umat beragama, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tegas pelarangan dan pencabutan izin resmi FPI dan HTI. Ormas tersebut merupakan ormas dan kelompok Islam yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Namun, ada catatan merah di pemerintahan Jokowi saat ini, yakni belum ada peninjauan kembali undang-undang yang diskriminatif.

Kata Kunci: Moderasi Islam; Joko Widodo; Susilo Bambang Yudhoyono.

PENDAHULUAN

Sebelum abad ke-20 agama tidak diperkenankan untuk dibahas, didiskusikan, dan mendapatkan banyak intervensi dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Agama dipertahankan untuk tetap berada dalam ranah privat dan suci (Casanova, 1994; Fox, 2001). Namun, memasuki tahun 1960an terdapat diskusi publik oleh para sosiolog agama yang memperdebatkan lembaga publik (negara) dan swasta (Dempsey, 1989). Mereka mengatakan bahwa agama mengalami pergeseran ruang dimana yang semulanya berada dalam ranah privat bergerak ke ranah publik. Agama dinilai mengalami penurunan ketika mengalami pergeseran ke dalam ranah publik, namun walaupun demikian agama tetap mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologis masyarakat. Keberadaan agama dalam ranah publik mendorong hadirnya unsur-unsur politik didalamnya (Casanova, 1994).

Pergeseran ruangan yang dialami oleh agama mengalami perluasan, tidak hanya di dalam urusan dalam negeri, namun juga berkembang menjadi urusan luar negeri. Pemerintah mulai menilai adanya urgensi dalam



menggunakan agama sebagai sumber perdamaian (Fox, 2001). Realita demikian mematahkan asusmi bahwa agama sebagai ancaman terutama dalam menjaga stabilitas politik dan diorientasikan pada perperangan seperti yang terjadi di abad ke-16 (Bader, 1999). Saat ini agama seringkali menjadi bahan diskusi di ruang-ruang publik bahkan dalam forum-forum internasional. Adapun isu-isu yang diperbicangkan menyangkut problematika sosial masyarakat, kemajuan peradaban manusia dan implikasinya kepada sisi moralitas manusia, hingga kepada berbagai kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Bagi banyak pemerintahan saat ini menggambarkan agama sebagai unsur dalam kehidupan masyarakat yang harus diutamakan dan diprioritaskan (Anwar, 2010). Agama kini seringkali dipandang sebagai alat kontrol sosial untuk membantu berjalannya kebijakan publik yang berjalan.

Urgensi agama dalam urusan perpolitikan kian meningkat pasca terjadinya serangan terorisme di gedung World Trade Center (WTC), Amerika Serikat pada tahun 2001 lalu yang telah menewaskan ± 3000 orang. Kelompok teroris yang menjadi pelaku dari serangan tersebut membawa unsur-unsur agama sebagai identitas mereka dan oleh karena ini adanya peningkatan isu agama dalam politik global. Amerika Serikat yang telah dirugikan akibat serangan tersebut mengajak banyak negara untuk bersama-sama memerangi aksi terorisme. Namun, terjadi misperception yang mendorong adanya polarisasi respon dari masyarakat yaitu memandang Islam sebagai agama yang melegalkan aksi kekerasan. Misperception yang terjadi ini menjadikan negara-negara yang didominasi masyarakat beragama Islam berada dibawah tekanan besar termasuk Indonesia (Purwono, 2016).

Cara negara-negara barat memandang islam terbagi menjadi menjadi dua yaitu “Muslim yang Baik” dan “Muslim yang Jahat”. Umat Islam yang digambarkan dengan konotasi jahat adalah kelompok teroris atau umat Islam yang beraliran ekstremis. Sedangkan umat Islam yang diidentik dengan keterangan “Baik” adalah mereka yang dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya terutama yang berbeda dari mereka (Mamdani, 2002). Pemerintah Indonesia mengalami ketakutan akan penilaian dari negara barat dan negara lainnya. Ketakutan dan kekhawatiran ini mendorong adanya inisiatif dari pemerintah Indonesia mempromosikan nilai-nilai moderat dalam agama. Pemerintah Indonesia mengundang dan mengajak seluruh pemuka agama, praktisi perdamaian, institusi pemerintahan, akademisi, awak media, hingga

masyarakat sipil untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dari penerapan nilai-nilai moderat.

Terdapat motif utama dari upaya mempromosikan nilai-nilai moderat dalam urusan politik luar negeri ataupun dalam negeri yaitu membuktikan bahwa Islam di Indonesia tidaklah sebagai agama melegitimasi aksi-aksi kekerasan. Pemerintah Indonesia ingin membuktikan bahwa Islam di Indonesia sebagai agama yang mencitai perdamaian, terbuka dengan keberagaman, dan menghargai antar umat beragama (Fachir, 2020). Ada beragam terminologi yang berkembang dan dipromosikan oleh pemerintah Indonesia guna memperbaiki citra Islam di Indonesia yaitu dari Islam Nusantara, menjadi Islam moderat mulai disematkan dalam semua agama yaitu dengan istilah moderasi beragama.

Urgensi agama dalam urusan politik luar negeri yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia bermula dari berbagai hadirnya tindakan intoleran oleh kelompok-kelompok ekstremis dan memiliki ideologi radikal. Adapun eksistensi kelompok ekstremis ini mulai muncul ketika Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kembalinya hak-hak asasi manusia kepada masyarakat sipil dan kembalinya nilai-nilai demokrasi di Indonesia (Gunawan et al., 2018). Selama era reformasi banyak kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi membangun kembali sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Kehadiran partai-partai politik, organisasi keagamaan, hingga organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki beragam latarbelakang identitas mewarnai perpolitikan era reformasi.

Kembalinya nilai-nilai demokrasi ini tidak hanya membawa pengaruh positif bagi Indonesia dan masyarakat, namun juga menjadi tantangan sekaligus problematika sosial baru bagi Indonesia. Kehadiran ormas-ormas ini menjadi momok tersendiri terutama bagi persatuan dan kesatuan Indonesia salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI). FPI telah hadir sebagai salah satu ormas yang menggunakan nilai-nilai Islam yang mereka yakini sebagai legitimasi atas tindakan mereka. Kehadiran FPI mendatangkan masalah sosial yang baru bagi Indonesia yaitu aksi sweeping yang dilakukan FPI seringkali bersifat destruktif dan kelompok minoritas baik suku ataupun agama kerap menjadi korban kekerasan yang mereka lakukan. FPI mengincar rumah makan,



pertokoan, dan tempat hiburan yang mereka yakini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam untuk dijadikan sasaran razia.

Tindakan intoleransi yang dilakukan oleh FPI menjadi salah satu pematik merenggangnya hubungan antar umat beragama di Indonesia dan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia membukti bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan dan keragaman. Selama tujuh puluh tujuh tahun, Indonesia mengalami pergantian pemimpin dan dua diantaranya dipilih secara langsung oleh rakyat. Para pemimpin ini membawa agenda politik untuk menjadi target yang harus dipenuhi selama pemerintahannya. Dalam artikel ini peneliti telah melakukan analisis terkait “bagaimana dinamika penggunaan terminologi moderat dalam kebijakan pemerintah Indonesia guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia?”. Peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya berfokus kepada pemerintahan dua presiden Indonesia yang terpilih melalui pemilihan umum langsung yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Kedua pemimpin Indonesia ini dipercaya kuat untuk memerintah Indonesia selama dua periode yaitu SBY dengan periode pertama di tahun 2004-2009, dan periode kedua (2009-2014). Kemudian Presiden Joko Widodo yang memimpin dari tahun 2014-2019 sebagai periode pertama, dan dilanjutkan pada periode kedua tahun 2019 hingga saat ini. Dari penelitian ini ditemukan adanya perbedaan yang terjadi dalam upaya penanganan potensi konflik antar umat beragama di Indonesia. Walaupun Presiden SBY dikenal dengan salah satu pemimpin Indonesia yang berusaha memperbaiki citra Islam di Indonesia kepada negara luar, namun gagal dalam menangani para pelaku kekerasan antar agama di dalam negeri.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo yang tidak menempatkan concern utama pemerintahannya dalam memperbaiki citra Islam, namun aktif melakukan tindakan tegas dalam menghilangkan kesempatan ormas-ormas ekstremis dan radikal di Indonesia. Tindakan kedua pemimpin Indonesia dalam menangani para pelaku kekerasan antar umat beragama, tidak dapat terlepas dari adanya asumsi dan penilaian publik yang menilai baik Presiden SBY dan Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teori faith and diplomacy untuk menelusuri jejak sejarah masuknya agama ke dalam aspek perpolitikan negara. Peneliti juga menggunakan konsep diplomasi

publik untuk menjelaskan strategi politik luar negeri Indonesia untuk mendukung penggunaan terminologi moderat dalam menjaga persatuan Indonesia dari urusan politik luar negeri.

Peneliti memahami bahwa terminologi moderat tidak dapat dipisahkan dari adanya kepentingan nasional Indonesia, oleh karena itu peneliti memasukan konsep national interest dalam kerangka teori penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis politik dalam negeri, peneliti menggunakan teori perbandingan politik yang mana didalamnya terbagi menjadi tiga yaitu rasional, struktural dan kultural. Peneliti menganggap sangat penting penggunaan teori perbandingan politik ini untuk menunjang penelitian ini agar dapat menelusuri latar belakang pengambilan kebijakan oleh kedua presiden Indonesia yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Selain itu dalam teori perbandingan politik ini dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan terminologi moderat sebagai bagian dalam kebijakan pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan SBY dan Jokowi.

METODE

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peranan dan dinamika penggunaan terminologi moderat sebagai alat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis secara deskriptif dinamika kebijakan publik baik di ranah politik luar negeri ataupun dalam negeri oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada beberapa tokoh akademis yaitu Prof. Dr. Abdul Mu'ti, Zainal Abidin Bagir, Ph.D., Dicky Sofjan, Ph.D, dan Ludiro Madu, S.IP, M.Si. Kemudian peneliti juga mewawancarai Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Yusron Bahauddin Ambary, S.Sos., M.Si. Direktorat Diplomasi Publik Kemlu RI menjadi bagian penting dalam perjalanan penggunaan terminologi moderat di isu sosial budaya Indonesia.

Direktorat Diplomasi Publik telah mengadakan banyak pertemuan internasional yang membawa isu-isu moderat dalam kehidupan beragama seperti di forum dialog antar agama ataupun kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia sebagai praktisi perdamaian. Pemaparan ringkas mengenai peranan dan track record dari Direktorat Diplomasi Publik tersebut menjadi latar belakang dan alasan peneliti mewawancarai Direktur



Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan masing-masing narasumber yang lain dan telah dipilih oleh peneliti merupakan para praktisi perdamaian di Indonesia dan memiliki pengalaman dalam berbagai pertemuan dialog antar agama di Indonesia ataupun dalam forum internasional. Selain itu para narasumber juga merupakan akademisi yang berfokus dalam isu-isu agama, pluralisme, politik dan agama dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo

Keraguan terhadap kinerja Presiden SBY dari aspek sosial budaya berasal dari tingkat toleransi di Indonesia yang mengalami penurunan yang signifikan. Terjadi banyak insiden yang melanggar kebebasan beragama di Indonesia. Berbagai aksi-aksi pengrusakan dan penutupan rumah beragama secara sepihak terjadi di Indonesia. Aksi diskriminatif ini tidak mendapatkan perhatian dan tindakan tegas dari Presiden SBY. Banyak kelompok-kelompok agama minoritas tidak mendapatkan haknya untuk dapat beribadah dengan aman. Menurut data Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2011 tercatat sebanyak 244 insiden pelanggaran KBB. Adapun dari peristiwa tersebut diantaranya dilakukan oleh negara yang menggunakan pejabat publik dengan mengeluarkan statement provokatif sehingga mengundang terjadinya kekerasan (Dwi R et al., 2012).

Indonesia sebelumnya telah meratifikasi perjanjian kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama. Namun dari tindakan kekerasan yang telah banyak terjadi membuktikan bahwa Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden SBY belum mampu menjaga komitmen mereka untuk melindungi seluruh umat beragama di Indonesia.

Presiden SBY “lengah” terhadap problematika dalam negeri. Bukti dari data yang dikumpulkan oleh Setara Institut menggambarkan Presiden SBY tidak menaruh perhatiannya kepada masyarakat Indonesia seluruhnya terutama kepada kelompok minoritas. Hasil positif dari penggunaan terminologi moderat hanya mendatangkan keuntungan satu sisi dan sisi lainnya mengalami kerugian. Adapun yang dipromosikan Presiden SBY kepada negara-negara luar tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi didalam negeri. Keraguan terhadap kinerja

Presiden SBY ini meningkat ketika jumlah korban dari aksi kekerasan sebagian besar dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan jemaat Kristiani. Kelompok Ahmadiyah yang menjadi korban terbanyak pelanggaran KKB disebabkan oleh Presiden SBY tidak memiliki inisiatif untuk meninjau kembali UU No. 4 Tahun 1/PNPS/1965 Tentang Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Masa pemerintahan Presiden SBY yang dinilai sebagai momentum kembalinya berjalannya demokrasi dan adanya indikasi terjaminnya hak-hak politik serta kebebasan sipil. Momentum ini digunakan FPI untuk leluasa melakukan agenda politik di Indonesia termasuk tindak kejahatan dan pelanggaran HAM terutama kepada kelompok agama minoritas di Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden SBY tidak ditemukan adanya tindakan tegas dan hanya sekedar menegur secara verbal apabila FPI telah melakukan aksi dekstupktif di Indonesia. Kemunduran pemerintahan SBY tidak hanya diakibatkan oleh fenomena korupsi yang mengalami peningkatan, namun juga disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan Presiden SBY terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Dalam beberapa kesempatan Presiden SBY terlihat memberikan “special privilege” dan tidak memperhatikan kondisi para korban dari tindak kekerasan oleh FPI.

Ancaman yang bersumber dari tindak arogan FPI kepada kerukunan masyarakat Indonesia luput dari perhatian Presiden SBY dan ini juga yang menyebabkan menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja kepemimpinan dari mantan Jenderal TNI tersebut. Selanjutnya, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi juga ditemukan beragam tantangan. Dari wawancara dengan Sekretaris Jenderal Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., melalui saluran telepon, beliau menceritakan pengalamannya sebagai delegasi Indonesia dalam mengkampanyekan Islam Moderat ke negara-negara di daratan Eropa. Dalam kunjungan luar negeri tersebut, pandangan negara barat yang menilai Indonesia sebagai sarang teroris tidak sepenuhnya hilang. Masih banyak mahasiswa yang menilai Indonesia menjadi home ground kelompok-kelompok teroris di Indonesia (Mu'ti, 2021).

Setelah penyampaian materi mengenai penerapan nilai-nilai moderat dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, mahasiswa sebagai peserta pertemuan mempertanyakan tentang kondisi kelompok Ahmadiyah. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa kelompok Ahmadiyah telah mengalami



kekerasan baik oleh FPI, negara, dan kelompok-kelompok konservatif nasionalis lainnya. Pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut membuat dilema perwakilan Indonesia karena adanya ketidaksesuaian dengan yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia. Walaupun presentase kerukunan umat beragama di Indonesia masih berada diangka yang terbilang aman yaitu 70% (Djafar, 2020), namun percikan-percikan kecil yang bersumber dari kekerasan yang dilakukan kepada Ahmadiyah dapat menjadi perkara besar apabila dibiarkan.

Diskriminasi kepada kelompok penghayat kepercayaan juga masih terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi dan tidak ada regulasi yang dapat menjamin hak asasi manusia dari para penghayat kepercayaan lokal di Indonesia. Perkara pencantuman identitas agama di Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang tidak diperkenankan selain agama-agama yang diijinkan secara konstitusi menjadi sumber diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri juga keberadaan KTP sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia disebabkan KTP diperlukan untuk dapat mengakses sebagian besar pelayanan publik. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan tantangan lainnya yang dapat menghambat masa depan penerapan nilai-nilai moderat, yaitu dari banyaknya regulasi yang tidak mendapatkan perhatian juga dari Presiden Jokowi. Adapun beberapa undang-undang nasional Indonesia yang harus segera dihapuskan atau direvisi, peneliti menemukan data Wahid Institute tahun 2015 sebagai berikut (Maarif, 2020):

1. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Peringatan dan Tata Tertib Kepada Jemaat, Anggota, dan/atau Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
5. Berbagai Peraturan Daerah tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah.

Catatan merah yang dimiliki oleh pemerintahan Presiden Jokowi sudah sebaiknya dijadikan refleksi agar segera mendapatkan solusi untuk menyelamatkan keberagaman di Indonesia. Penting untuk digarisbawahi bahwa isu kekerasan dalam kehidupan beragama tidak hanya dilakukan ataupun terjadi akibat serang terorisme, ekstermisme, dan gerakan-gerakan politik agama konservatif. Namun, ketidakadilan yang disebabkan oleh regulasi yang bersifat diskriminasi dapat merusak tatanan harmonis masyarakat Indonesia yang majemuk.

SIMPULAN

Presiden SBY ataupun Presiden Jokowi menghadapi problematika dalam negeri yang sama membuat adanya dilemma, yakni disebabkan oleh masih maraknya kekerasan terhadap umat beragama seperti yang terjadi di era SBY. Kemudian banyaknya regulasi-regulasi yang bersifat diskriminatif kepada kelompok penghayat kepercayaan dan tidak mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi hingga saat ini. Catatan-catatan merah yang dimiliki oleh kedua pemimpin yang pernah dan sedang berkuasa di Indonesia ini telah menyita perhatian dari kalangan pemuda dan masyarakat global dengan mempertanyakan komitmen dan konsistensi penerapan nilai-nilai moderat dalam urusan sosial dan budaya di Indonesia.

Selama melakukan penelitian ini terdapat banyak kekurangan akibat keterbatasan sumber dan politik yang selalu berdinamika. Peneliti menyadari sebagian keterbatasan yang dialami selama penelitian ini disebabkan terbatasnya ruang gerak selama penelitian akibat pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar wawancara dilakukan menggunakan saluran telepon, dan zoom meeting. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat disempurnakan oleh para akademisi, ataupun individu yang berkecimpung dalam isu-isu hubungan internasional, dinamika kehidupan beragama dan bermasyarakat, dan studi pembangunan nasional. Tentunya penelitian ini juga dapat terbuka untuk studi-studi lainnya untuk dikembangkan. Namun, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berorientasikan kesejahteraan dan keharmonisan hubungan antar masyarakat. Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk



menyadarkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia sangat perlu perhatian dari pemerintah dan semua pihak.

REFERENSI

- Albright, M. (2006). Faith And Diplomacy. *The Review of Faith & International Affairs*, 4(2), 3–9.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2006.9523244>
- Anwar, D. F. (2010). Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3(1), 37–54.
<https://doi.org/10.14203/JISSH.V3I1.45>
- Bader, V. (1999). Religious Pluralism: Secularism or Priority for Democracy. *SAGE Publication: Political Theory*, 25(5), 597–633.
- Bagir, Z. A. (2010). *Dialog Antarumat Beragama*. Mizan Publiko.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Dempsey, K. (1989). Is Religion Still Relevant in the Private Sphere? The State of Organized Religion in an Australian Rural Community. *Sociological Analysis*, 50(3), 247–263.
- Djafar, A. M. (2020). *Rekomendasi Kebijakan: Perlunya Langkah Terobosan Pemerintah*. www.wahidfoundation.org
- Dubosh, E., Poulakis, M., & Abdelghani, N. (2015). Islamophobia and Law Enforcement in a Post 9/11 World. In *Islamophobia Studies Journal* 3(1).
- Dwi R, Agnes., Hasani, Ismail., & Naipospos, B. Tigor. (2012). *Politik diskriminasi rezim Susilo Bambang Yudhoyono kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2011*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *INTIZAR*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Falahi, Z. (2013). Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty. *Jurnal Global & Strategis*.
- Falahi, Z. (2015). Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2(1), 31–49. <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/18>
- Farizan, F. N., & Heryadi, D. (2021). Indonesia's Involvement in the Afghanistan Peacebuilding Process. *Global: Jurnal Politik*

- Internasional*, 22(2), 244.
<https://doi.org/10.7454/global.v22i2.475>
- Fox, J. (2001). Religion as an Overlooked Element of International Relations. *International Studies Review*, 3(3), 53–73.
<https://www.jstor.org/stable/3186242?seq=1&cid=pdf-link>
- Gunawan, B., Tinggi, S., & Negara, I. (2018). Threats to the Ideology of Pancasila In the Reform Era: Praxis Case of Regional Development Policy. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(1), 56–82.
<https://doi.org/10.18196/JGP.V9I1.4070>
- Hoesterey, J. (2016). *Rebranding Islam: Public Diplomacy, Soft Power, and the Making of "Moderate Islam."* Contending Modernities.
<https://contendingmodernities.nd.edu/field-notes/aci-indonesia-rebranding-islam-public-diplomacy-soft-power-and-the-making-of-moderate-islam/>
- Hoesterey, J. B. (2013). Is Indonesia a Model for the Arab Spring? Islam, Democracy, and Diplomacy. *Review of Middle East Studies*, 47(2), 157–165. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S2151348100058043>
- Huda, N., Hamid, N., & Misbah, M. K. (2020). Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer). *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 22(2), 198–231. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016, March 31). Hadap Presiden Jokowi, PBNU Akan Gelar Pertemuan Pemimpin Islam Moderat Dunia. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). Kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan, Pertemuan Dua Sahabat. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017). *Wajah Islam Moderat Dalam Diplomasi Indonesia*. Tabloid Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

